

**KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN HAK  
DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA  
PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

**TESIS**

**Oleh:**

**AWINULLAH**

**201720251010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan  
Kebebasan Beragama Di Indonesia Pasca  
Amandemen UUD 1945  
Nama Mahasiswa : AWINULLAH  
Nomor Pokok : 201720251010  
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Fakultas Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 17 Juli 2019

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIDN. 0319046403

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH.  
NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan  
Kebebasan Beragama Di Indonesia Pasca  
Amandemen UUD 1945

Nama Mahasiswa : AWINULLAH

Nomor Pokok : 201720251010

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Fakultas Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : Kamis, 11 Juli 2019

Jakarta, 17 Juli 2019

Ketua Tim Penguji Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., MH  
NIDN.0323035802

Penguji I Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.H., MM  
NIDN. 0323015604

Penguji II Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0325117405

Mengesahkan,

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Awaluddin Marwan, SH., MH., MA  
NIP. 1904408

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH  
NIP. 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Bahwa:

Tesis yang berjudul:

### **Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**

Ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 17 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Awinullah**  
201720251010

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan rasa syukur penulis mempersembahkan Tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, yang disusun untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2019

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Pembimbing II atas bimbingan ilmu dan pengalaman sehingga Tesis dapat terselesaikan. Juga kepada Bapak Dekan Fak Hukum, Bapak Kaprodi Magister Hukum, para dosen pengajar, para staf sekretariat, teman-teman kelas 18 MH kelas Bekasi, dan segenap civitas akademika universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya mengucapkan terimakasih atas ilmu yang diberikan, dukungan yang penuh dan persahabatan yang hangat.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan rekan kerja di Kementerian Agama yang telah memberikan dukungan dan izin untuk mencuri waktu mengerjakan Tesis ini di sela-sela aktifitas pekerjaan. Serta tak lupa terimakasih kepada istri tercinta Rizki Andalusia atas dukungan dan kesabarannya, semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Bekasi, 17 Juli 2019



**Awinullah**  
201720251010

## ABSTRAK

Awinullah, 201720251010, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan Kebebasan Beragama di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Tujuan penulis adalah untuk meneliti bagaimanakah norma tentang pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, dan meneliti apakah norma tersebut telah terimplementasikan dengan baik dalam undang-undang. Dalam penelitian ini diambil sampel 2 (dua) undang-undang yakni UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan UU 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan UU 35/ 2014, untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak (UUPA).

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Artinya penelitian ini memaparkan pembahasan dan hasilnya dalam bentuk deskripsi yang kemudian dilakukan analisa menggunakan teori maupun logika.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat norma terkait dengan hak dan kebebasan beragama, yakni pasal 28 E ayat (1); pasal 28I ayat (1); pasal 28J; dan pasal 29 ayat (2). Dari rangkaian norma tersebut diambil kesimpulan bahwa hak beragama di Indonesia diberikan kebebasan dan jaminan oleh negara, akan tetapi harus tunduk pada pengaturan melalui undang-undang, semata-mata untuk melindungi hak asasi orang lain dan kepentingan umum.

Norma tersebut telah terimplementasikan dengan baik secara normatif dalam UU Sisdiknas, yang menjamin bahwa setiap murid berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya oleh guru yang seagama; serta dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin Anak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.

**Kata Kunci:** UUD 1945, Kebebasan Beragama, Pendidikan, Perlindungan Anak

## **ABSTRACT**

Awinullah, 201720251010, *Legal Policy Regarding Regulations on Religious Rights and Freedom in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution.*

*The author's aim is to examine the norms regarding the regulation of religious rights and freedoms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment, and examine whether these norms have been properly implemented in the law. In this study a sample of 2 (two) laws was taken, namely Law 20/2003 concerning the National Education System (UU Sisdiknas), and Law 23/2002 concerning Child Protection, which was later amended by Law 35/2014, hereinafter referred to as the Child Protection Act (UUPA).*

*The type of this research is normative juridical research using; a library research that is descriptive analytical. This means that this study presents the results in descriptions which then analyzed using theory and logic.*

*This research found that in the post-amendment of the 1945 Constitution there were norms related to rights and freedom of religion, namely article 28E paragraph (1); Article 28I paragraph (1); Article 28J; and article 29 paragraph (2). From this set of norms, it is concluded that religious rights in Indonesia are given freedom and guarantees by the state, but must be subject to regulation through law, solely to protect the rights of others and the public interest.*

*This norm has been implemented properly and normatively in the National Education System Law, which guarantees that every student has the right to receive religious education according to his / her religion by a teacher of the same religion; and in the Child Protection Act that guarantees children to embrace religion and worship according to their religion.*

**Keywords:** *1945 Constitution, Religious Freedom, Education, Child Protection*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan rasa syukur penulis mempersembahkan Tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, yang disusun untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2019

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Pembimbing II atas bimbingan ilmu dan pengalaman sehingga Tesis dapat terselesaikan. Juga kepada Bapak Dekan Fak Hukum, Bapak Kaprodi Magister Hukum, para dosen pengajar, para staf sekretariat, teman-teman kelas 18 MH kelas Bekasi, dan segenap civitas akademika universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya mengucapkan terimakasih atas ilmu yang diberikan, dukungan yang penuh dan persahabatan yang hangat.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan rekan kerja di Kementerian Agama yang telah memberikan dukungan dan izin untuk mencuri waktu mengerjakan Tesis ini di sela-sela aktifitas pekerjaan. Serta tak lupa terimakasih kepada istri tercinta Rizki Andalusia atas dukungan dan kesabarannya, semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Bekasi, 17 Juli 2019

  
**Awinullah**  
201720251010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5. Batasan Masalah	10
1.6. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir	10
1.7. Metode Penelitian	26
1.8. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Tinjauan Konsep Agama Di Indonesia	31
2.1.1. Definisi Umum Tentang Agama	31
2.1.2. Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Indonesia	35
2.2. Konsep Jaminan Hak Dan Kebebasan Beragama	40
2.3. Kajian Pustaka	48
BAB III HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN	52
3.1. Amandemen UUD 1945	52
3.1.1. Pengertian Konstitusi	52
3.1.2. Pemberlakuan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia	57

3.1.3.	Situasi Sosial Politik yang Melatarbelakangi Amandemen UUD 1945	62
3.1.4.	Kelemahan-Kelemahan UUD 1945 yang Menjadi Alasan Dilakukannya Amandemen	70
3.2.	Norma Hak Dan Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen	79
3.2.1.	Norma Terkait Agama dalam UUD 1945	79
3.2.2.	Norma Terkait Hak dan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945	85
3.2.3.	Kesesuaian Norma Hak dan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945 dengan Norma Hak dan Kebebasan Beragama dalam Dokumen Internasional tentang HAM	95
BAB IV	PENGATURAN HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG	103
4.1.	Hak dan Kebebasan Beragama Dalam Aspek Pendidikan	103
4.1.1.	Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Nasional	103
4.1.2.	Pendidikan Agama	
4.1.2.1.	Pendidikan Agama Usia Dini	109
4.1.2.2.	Pendidikan Agama Usia Remaja	112
4.1.2.3.	Pendidikan Agama Usia Dewasa	114
4.1.2.4.	Pendidikan Agama Melalui Budaya	117
4.1.3.	Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama dalam UU 20/ 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.	122
4.2.	Hak dan Kebebasan Beragama dalam Aspek Perlindungan Anak	130
4.2.1.	Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak	130
4.2.2.	Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	135
BAB V	PENUTUP	144
5.1.	Simpulan	144
5.2.	Saran	148
DAFTAR PUSTAKA		150

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Norma-Norma Terkait Agama Dalam UUD 1945	85
Tabel 2	Norma Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945	94
Tabel 3	Korelasi UUD 1945, UDHR dan ICCPR	102
Tabel 4	Hak dan Kebebasan Beragama Dalam UU 20/2003 Tentang Sisdiknas	125
Tabel 5	Norma Hak Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 jo UU 35/2014)	142
Gambar 1	Bagan Landasan Teori	12
Gambar 2	Bagan Kerangka Berfikir	25
Gambar 3	Diagram Hak Dan Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945	146
Gambar 4	Diagram Implementasi Norma Hak Dan Kebebasan Beragama UUD 1945 Dalam Undang-Undang	148